

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS terhadap PNS yang tidak netral pada saat Pilkada Kota Yogyakarta sudah sesuai dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari prosedur tata cara pemanggilan, pemeriksaan, hingga pembuktian yang dilakukan oleh Inspektorat, telah mengikuti ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS terhadap indikasi pelanggaran netralitas PNS pada saat Pilkada Kota Yogyakarta. Sampai saat ini penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang tidak netral pada saat Pilkada Kota Yogyakarta tidak ada, karena dalam pembuktiannya tidak terbukti adanya pelanggaran netralitas.
2. Faktor penghambat implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS terhadap PNS yang tidak netral dalam pelaksanaan pilkada Kota Yogyakarta dapat disebabkan oleh :
 - a. Faktor pekerjaan.
 - b. Faktor tugas luar kota.
 - c. Tidak ada identitas pelaporBentuk upaya dalam menangani hambatan tersebut yaitu dengan melakukan rencana lain atau agenda lain. Tidak ada waktu kosong

untuk melakukan pemeriksaan. Namun berdasarkan keterangan lain dari Inspektorat selama ini tidak ada pegawai yang tidak kooperatif. Selama ini inspektorat tidak pernah melakukan pemanggilan pegawai hingga 2 (dua) atau 3 (tiga) kali untuk dilakukannya pemeriksaan. Sehingga dapat diketahui yang dapat menjadi faktor penghambatan dalam Implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS terhadap PNS yang tidak netral pada saat pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta hanya terdapat pada mekanisme kegiatan Pemanggilan dan pemeriksaan jika tidak dilakukannya bentuk upaya lain.

B. Saran

1. Penyelenggaraan pemerintahan di Kota Yogyakarta. Dengan adanya PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS ini dapat menjadi penunjang yang baik dalam birokrasi dan sistem Pemerintahan.
2. PNS diharapkan paham dan sadar mengenai kewajiban dan larangannya untuk dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas negara.
3. Adanya laporan indikasi pelanggaran ini diharapkan pemerintah seharusnya dapat lebih meningkatkan monitoring disetiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan hal ini dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja Pemerintahan Kota Yogyakarta untuk menciptakan pemerintahan yang baik.